

SPIRIT WALISONGO DAN DEMOKRASI PANCASILA: Spiritualitas Berislam dan Berdemokrasi

Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag

Pendahuluan

Indonesia merupakan negeri Muslim terbesar di dunia yang memiliki keragaman budaya yang amat kaya. Budaya itu kebanyakan bersendikan agama, terutama Islam, yang memengaruhi proses olah pikir, olah rasa, dan olah cipta sehingga menghasilkan hasil kebudayaan yang tinggi. Budaya kuliner, misalnya, merupakan hasil olah pikir, olah rasa, dan olah cipta itu sejak ribuan tahun yang lalu. Ajaran Islam melalui Sunan Kudus memberikan bukti bahwa asimilasi budaya kuliner melalui soto Kudus mampu menjadi sarana politik untuk menumbuhkan sikap toleransi di masyarakat Kudus. Seluruh provinsi di Indonesia memiliki kekayaan budayanya masing-masing yang berguna bagi pertumbuhan demokrasi. Walisongo memberikan inspirasi yang besar dalam kehidupan masyarakat Jawa dan Indonesia pada umumnya. Inspirasi itu

terwujud dalam berbagai filosofi yang hidup dan tumbuh secara turun-temurun sejak abad ke-15 M.

Walisongo dan Filosofi Jawa

Walisongo merupakan inspirasi penting dalam akulturasi Islam dan budaya lokal. Jawa Tengah, misalnya, sebagai jantung budaya Jawa memiliki filosofi budaya yang mendalam yang berakulturasi dengan berbagai ajaran agama seperti Hindu, Budha, dan Islam. Akulturasi itu membentuk budaya agama yang khas.

Walisongo hadir dalam konteks budaya Jawa yang kaya itu. Di tangan Walisongo kemudian tercipta filosofi hidup yang khas pula. Filosofi itu kemudian berperan penting dalam membentuk tata sosial masyarakat. Ini terlihat jelas di Provinsi Jawa Tengah. Provinsi yang memiliki luas wilayah 32.546 KM² (setara dengan 25,04 % luas Pulau Jawa) dan dihuni 35.557.249 jiwa itu (BPS Jateng 2020) memiliki filosofi yang berperan penting dalam membangun masyarakatnya.

Di antara filosofi itu adalah: (1). *Sangkan Paraning Dumadi*. Filosofi ini berarti bahwa manusia Jawa harus mengetahui hakikat dan tujuan hidup yakni tercapainya kesempurnaan hidup yang berisikan kesopanan, kebaikan, dan ketakwaan. (2). *Manunggaling Kawula Gusti*. Falsafah ini mengandung arti bahwa manusia Jawa itu harus dekat dan sedekat-dekatnya hingga menyatu dengan Tuhan agar sifat Tuhan dapat dijumpai dalam diri manusia Jawa. Filosofi ini merupakan sikap untuk *manembah*. *Manembah* adalah menghubungkan diri secara sadar, mendekat, menyatu, dan manunggal dengan Tuhan. Dalam falsafah Jawa, filosofi ini sesungguhnya lebih merupakan pengalaman spiritual dan bukan ajaran. Pengalaman ini bisa jadi sangat subjektif. Namun, pengalaman ini dalam tradisi masyarakat Jawa terbukti bisa diperoleh melalui laku konsentrasi, pengendalian diri, penyucian hati, dan olah batin yang maksimal.

Dalam tradisi keislaman, pengalaman ini dikenal dengan

tradisi tasawuf. Para pendiri bangsa memiliki jalan pikiran yang mementingkan spiritualitas itu. Bung Hatta, misalnya, menyatakan "...jika orang ingin memperjuangkan ajaran Islam di Indonesia, pakailah "ilmu garam, tidak ilmu gincu". Agama lain juga selayaknya demikian. Semua pemeluknya sebaiknya lebih mementingkan isi agama yang berupa nilai keluhuran bukan kulit agama. Gagasan semacam ini, sesungguhnya berakar kuat pada pemahaman para Walisongo atas Islam yang secara turun-temurun dilanjutkan oleh para ulama dan tokoh-tokoh pejuang termasuk Pangeran Diponegoro (1785-1855M).

Jika dirunut ke belakang lagi pandangan Islam Walisongo itu berakar pada ajaran Panteisme Ibnu Arabi (1165-1240M) yang mengakui *irfan (gnosticism)* sebagai jalan ilmu pengetahuan. Panteisme yang mengajarkan *wahdatul wujud (monism)* itu mengajarkan harmoni semua makhluk mengingat semua makhluk adalah pancaran cahaya Allah (emanasi). Semua makhluk bersumber dari satu titik tunggal. Oleh karena itu tidak mungkin saling bertentangan. Inilah akar yang pernah disampaikan Gus Dur dan sering dikutip berbagai media, bahwa: "...Jika kamu membenci orang karena dia tidak bisa membaca al-Quran, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah, tapi al-Quran. Jika kamu memusuhi orang yang berbeda agama dengan kamu, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah, tapi agama. Jika kamu menjauhi orang yang melanggar moral, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah, tapi moral. Pertuhankanlah Allah, bukan lainnya. Dan pembuktian bahwa kamu memertuhankan Allah, kamu harus menerima semua makhluk. Karena begitulah Allah." Dengan kata lain, Gus Dur mendorong manusia berperilaku sebagaimana Allah berperilaku terhadap makhluk-makhluk-Nya. Dalam diri manusia dan perilakunya hendaknya bisa ditemukan sifat-sifat Allah dengan segala kemuliaan dan keluhuran-Nya terutama dalam hal kasih sayang pada semua makhluk. (3). *Memayu Hayuning Bawana, Ambrasta dur Hangkara*. Filosofi ini berarti upaya untuk menjaga

dan mengusahakan perdamaian, ketertiban, kesejahteraan, dan kebaikan seluruh dunia dengan semangat memberantas nafsu angkara murka serta nafsu rendah manusia. Filosofi ini dilandasi konsep dasar budaya Jawa yang cinta pada harmoni, ketenteraman, dan kedamaian.

Dalam *Kakawin Negarakertagama* (Syair Negara Berdasarkan Agama) karya Empu Prapanca (1300-1350M), misalnya, dijelaskan bahwa orang Jawa telah lama memegang teguh prinsip dunia damai. Empu Prapanca menyatakan orang Jawa suka *masihi samastha bhuwana* yang artinya orang Jawa selalu berbuat mengasihi seluruh dunia (Endraswara 2012:39). Filosofi harmoni itu terdapat di seluruh Indonesia hingga Indonesia merdeka. Itulah maknanya, Pembukaan UUD 1945 menggariskan tentang pentingnya NKRI ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia.

Bung Hatta, walaupun bukan orang Jawa, ia merumuskan politik luar negeri Indonesia dengan rumusan bebas aktif. Bung Hatta selalu melakukan kajian filosofis sebelum merumuskan pikiran-pikirannya. Walaupun belum ada konfirmasi dari Bung Hatta bahwa politik luar negeri Indonesia itu digali dari falsafah Jawa, namun jalan pikirannya selaras dengan falsafah Jawa. PBB sering memberikan penghargaan atas konsistensi Indonesia dalam kiprah Internasionalnya guna mewujudkan perdamaian dunia melalui pengiriman Pasukan Garuda ke berbagai wilayah konflik di dunia.

Dari penjelasan di atas, secara ringkas bisa dinyatakan bahwa filosofi Jawa sesungguhnya sudah dikristalisasikan oleh para pendiri NKRI dalam Pancasila. Yana MH menyatakan bahwa filosofi Jawa jika diekstrak dapat disederhanakan menjadi 6 butir (MH 2010:78). Keenam butir itu adalah: (1). Ketuhanan Yang Maha Esa. (2). Kerohanian. (3). Kemanusiaan. (4). Kebangsaan. (5). Kekeluargaan. (6). Keduniawian. Jika direnungkan sesungguhnya keenam butir itu memang sudah terkandung dalam Pancasila. Pertanyaannya sudahkah nilai-nilai itu terwujud dalam sistem pemerintahan kita?

Walisongo dan Demokrasi Pancasila

Indonesia adalah negara Muslim demokratis terbesar di dunia. Pilihan menerapkan demokrasi sangatlah tepat. Dalam sistem pemerintahan modern, demokrasi dianggap sistem terbaik dari sistem pemerintahan yang ada. Mengapa? Karena demokrasi menjadikan rakyat sebagai penguasa yang sesungguhnya. Jika suatu masyarakat adalah masyarakat yang agamis, maka dengan sendirinya sistem demokrasi akan diisi dengan nilai keagamaan. Dalam demokrasi pada masyarakat agamis, agama sangat berperan penting. Agama merupakan sistem ajaran. Sistem ajaran membentuk pikiran dan sikap pemeluknya. Semua agama memerintahkan kebaikan untuk seluruh manusia dan alam semesta. Itulah maknanya agama jika dipahami esensinya, bukan kulitnya, dia akan dengan sendirinya selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi yakni kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan yang merupakan sendi dasar martabat kemanusiaan. Akan tetapi, jika agama dibatasi hanya kulit ajaran apalagi yang dibalut dengan kepentingan dan agenda politik kekuasaan, maka agama akan berubah fungsi menjadi kekuatan perusak yang mengerikan. Kasus mutakhir di Syria yang dilakukan oleh kelompok ISIS adalah contoh yang tak terbantahkan. Para pendiri negara Indonesia generasi 1945 telah menyadari potensi jebakan kulit agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka mereka merumuskan bahwa umat beragama di Indonesia harus menangkap esensi agama bukan kulit agama.

Pengalaman Indonesia modern menunjukkan bahwa demokrasi akan tumbuh bila tiga pilar demokrasi: *nation-state*, *civil society*, dan norma hubungan timbal-balik (*reciprocity*, saling percaya) berkembang dengan baik. Pilar-pilar itu jelas berupa esensi agama sebagaimana didakwahkan oleh Walisongo sejak abad ke-15 di Jawa. Pilar-pilar itu tidak bisa tumbuh di Pakistan dan banyak negara muslim lain karena memang ikatan kebangsaan mereka masih sangat rentan dan bercampur aduk dengan ikatan kulit keislaman. Unsur-unsur *civil society* di sana seperti kebebasan, persamaan, *law*

enforcement, dan konsep negara sekuler juga belum berkembang. Selain itu, sikap saling percaya antar kelompok etnis juga belum muncul sehingga ekstremisme keagamaan dan kemiskinan akut menyatu menghadang demokrasi dengan berbagai bentuk aksi kekerasan.

Negara-negara muslim itu perlu menyadari bahwa ajaran Islam sesungguhnya hanya memberikan filsafat politik dan belum memberikan ilmu politik. Ilmu politik berbeda dengan filsafat politik. Ilmu politik berbicara tentang apa yang terjadi sementara filsafat politik berbicara tentang apa yang seharusnya (Mel Thompson, 2010: 1-19). Ilmu politik dibangun dari riset-riset induktif yang empiris. Sementara filsafat politik dibangun dari riset deduktif yang idealistik. Berangkat dari perbedaan ini, maka menjadikan konsep teo-demokrasi (meminjam istilah al-Maududi) sebagai konsep ilmu politik tidaklah cukup. Bila konsep itu merujuk pada praktik politik *al-khulafā' ar-rāsyidūn* juga tidak cukup. Mengapa? Munawir Syadzali menjelaskan: "Kajian tentang kehidupan bernegara umat Islam semasa *al-khulafā' al-rāsyidūn*, telah memperlihatkan beberapa realitas seperti berikut: Dalam periode tersebut tidak terdapat satu pola baku dan seragam tentang cara pengangkatan khalifah atau kepala negara.... Sementara itu, prosedur atau cara melakukan koreksi terhadap khalifah atau kepala negara secara damai belum terlembagakan. Tiga dari mereka mati terbunuh. ...Gambaran indah tentang kehidupan politik pada masa *al-khulafā' ar-rāsyidūn* yang dilukiskan oleh sementara pemikir Islam, ternyata tidak ditopang oleh fakta-fakta sejarah, terutama sejak tahun-tahun terakhir Khalifah Usman...Dengan realitas tersebut di atas kiranya tidak banyak hal yang dapat kita teladani dari periode itu...." (Sjadzali 1990:233-34). "...perkembangan peradaban sudah sedemikian jauh sehingga umat Islam sekarang ini mampu mengatur kehidupan kenegaraannya dengan cara yang lebih sempurna daripada cara yang ditempuh oleh para pendahulu kita hampir empat belas abad yang lalu" (Sjadzali 1990:207-8).

Atas dasar nalar yang menempatkan konsep teo-demokrasi sebagai konsep etis dalam ranah filsafat politik bukan ilmu politik, maka pelaksanaan prinsip teo-demokrasi dalam dunia riil politik akan lebih mudah. Prinsip-prinsip teo-demokrasi bisa dimasukkan dalam sistem politik apapun termasuk monarki dan demokrasi. Seorang, raja, presiden, perdana menteri, harus dianggap menjalankan teo-demokrasi jika dalam dirinya terdapat nilai-nilai (esensi agama) yang dijunjung tinggi. Sebuah sistem politik berbasis demokrasi bisa dianggap Islami, jika didalamnya prinsip teo-demokrasi menjiwai sistem itu. Demokrasi Pancasila, misalnya, telah masuk dalam kategori ini. Kristalisasi dari prinsip teo-demokrasi yang diadaptasikan dengan dunia politik yang riil telah cukup menjadi pegangan bagi demokrasi modern agar menjadi Islami.

Terdapat tujuh buah nilai yang penting dalam teo-demokrasi yang juga merupakan esensi agama sebagai dasar hidup berbangsa dan bernegara secara modern. Nilai-nilai tersebut adalah: (1). Keyakinan bahwa kekuasaan berasal dari Tuhan dan Tuhan akan memberikannya pada orang yang beriman dan beramal salih. (2). Keyakinan bahwa kekuasaan dari Tuhan itu belum memiliki kekuatan formal kecuali bila sudah mendapatkan dukungan dari rakyat dalam bentuk *bai`at*. (3). Pemahaman bahwa kekuasaan yang sudah mendapatkan kekuatan formal harus dijalankan dengan berpedoman pada hukum Allah (al-Qur`an dan Hadis). (4). Keyakinan bahwa berdasarkan hukum Allah, penguasa bertugas memakmurkan rakyatnya baik di dunia ini maupun di akherat kelak. (5). Keyakinan bahwa cara mencapai dua macam kemakmuran itu adalah dengan menjalankan kekuasaannya berdasarkan hukum-hukum Allah (al-Qur`an dan Hadis) secara arif dan bijaksana. (6). Keyakinan bahwa secara garis besar hukum-hukum Allah itu mengharuskan para pemegang kekuasaan untuk menjunjung tinggi asas amanah, asas keadilan (keselarasan), asas musyawarah dengan referensi al-Qur`an dan Sunnah. (7). Keyakinan bahwa para rakyat

diwajibkan menaati penguasanya selama penguasa memegang prinsip-prinsip tersebut.

Bila dicermati secara mendalam, maka prinsip teo-demokrasi tersebut tak ada yang bertentangan dengan Pancasila. Maka demokrasi Pancasila sesungguhnya ijtihad kreatif yang amat cerdas dari bangsa Indonesia dalam menjadikan teo-demokrasi sebagai prinsip etis-filosofis sebagai sistem politik yang riil dalam konteks bangsa Indonesia yang plural. Persoalannya adalah bagaimana demokrasi Pancasila itu agar benar-benar berjalan di Indonesia secara konsisten? Apakah saat ini telah berjalan? Menurut saya belum. Sejak reformasi, Indonesia memilih jalan demokrasi liberal yang berbasis pada kapitalisme. Implementasi Demokrasi Pancasila pasca reformasi masih belum sepenuhnya mampu memenuhi kriteria demokrasi yang diimpikan para pendiri bangsa kita yang berakar kuat pada filosofi Jawa dan dilanjutkan oleh Walisongo itu.

Walisongo dan Tantangan Oligarki

Apakah bangsa ini akan menyerah pada keadaan? Mestinya tidak. Bangsa ini adalah bangsa pejuang. Bangsa ini haruslah merubah keadaan dengan kembali pada jati dirinya, yakni Pancasila. Bagaimana menjalankan demokrasi Pancasila yang konsisten dalam kepungan demokrasi liberal yang berbasis kapitalisme? Itulah tugas abadi bangsa Indonesia sejak sekarang hingga masa depan. Dalam perspektif agama, itulah jihad yang nyata saat ini.

Salah satu persoalan yang harus segera diselesaikan adalah pembentukan sistem multipartai yang sehat. Sistem multipartai saat ini terjebak pada persoalan mahalannya ongkos partai. Mayoritas ongkos partai yang setahun rata-rata 250 M itu ditanggung oleh swasta, iuran anggota, dan negara. Sayangnya sumbangan swasta mencapai 90 %. Itulah makanya partai disandera oleh para pemilik modal. Mestinya APBN membiayai 90 % dan yang 10 % adalah iuran anggota dan swasta agar partai mampu hidup lebih independen dan fokus pada kepentingan publik.

Partai yang dicengkeram oleh para pemilik modal akan melahirkan oligarki. Dalam oligarki, sekelompok kecil masyarakat yang menguasai aset ekonomi mampu menguasai kekuasaan politik yang kemudian digunakan untuk kepentingan kelompoknya dan mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Jika kekuatan ekonomi dan politik menyatu pada kelompok oligarki, maka mereka akan menyandera pemerintah bahkan tidak jarang akan mendikte pemerintah. Pemerintah yang mestinya membela rakyat akan berbelok membela kepentingan oligarki itu. Dengan demikian, oligarki jelas bertentangan dengan spirit Walisongo dalam menata masyarakat yang harmonis. Itulah makanya, oligarki harus dienyahkan dari NKRI! Bagaimana menurut Anda?

Daftar Pustaka

- Endraswara, Suwardi. 2012. *Memayu Hayuning Bawana: Laku menuju Keselamatan dan Kabahagiaan Hidup Orang Jawa*. Yogyakarta: Narasi.
- MH, Yana. 2010. *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa*. Yogyakarta: Absolut.
- Sjadzali, Munawir. 1990. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI-Press.